

URGENSI PERAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PROGRAM “URBAN FARMING” SEBAGAI DAYA DUKUNG KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI

Agus Danugroho^{1*}

¹ Prodi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi:

email: agus.danugroho@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya peran masyarakat perkotaan dalam pengembangan dan pelaksanaan program Urban Farming pada masa Pandemi untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Seperti kita ketahui bahwa masalah pangan merupakan permasalahan yang vital bagi kehidupan manusia. Urban Farming mempunyai tujuan untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan meringankan masalah pangan di perkotaan. Maka dari itu, perlu peranan dari masyarakat yang menjadi subjek akan terlaksananya program Urban Farming. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai literatur pustaka dan data untuk memperkuat argumen. Hasil yang ditunjukkan dalam paper ini adalah masyarakat perkotaan merupakan subjek utama dalam Program Urban Farming dan sekaligus menjadi penentu keefektifan program ini berjalan atau tidaknya. Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan keberhasilan Urban Farming. Selain itu, untuk mendukung ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan peran masyarakat dan stakeholder pendukung dari pemerintahan kota untuk mengembangkan Program Urban Farming.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Urban Farming, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Isu lingkungan akan muncul sebagai akibat dari ekspansi penduduk perkotaan, mulai dari alih fungsi lahan hingga penurunan kualitas lingkungan akibat polusi dan sampah. Krisis pangan akan terjadi jika laju pertumbuhan penduduk melebihi laju produksi pangan. Jumlah pangan yang tidak mencukupi pada saat yang sama akan mempengaruhi ketergantungan suatu daerah. Hal ini berlaku di wilayah metropolitan negara-negara berkembang, yang secara progresif menjadi konsentrasi populasi, pemukiman, dan kelompok masyarakat yang beragam secara etnis (Jalil, 2005). Situasi ini mendorong pemerintah dan warga kota metropolitan untuk mulai berupaya memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan memperbaiki kondisi lingkungan guna menghasilkan lingkungan yang sehat dan berkualitas (Noorsya & Kustiwan, 2013).

Pertanian perkotaan atau *Urban Farming* dimulai di Amerika Serikat sebagai respon terhadap posisi dan kondisi ekonomi yang buruk di banyak negara selama Perang Dunia II, terutama harga sayuran yang tinggi pada saat itu. Berbeda dengan Amerika Serikat, gerakan *Urban Farming* di Indonesia muncul dari kesadaran masyarakat akan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan banyaknya lahan yang tidak termanfaatkan. Gerakan *Urban Farming*, awalnya tiba di Jakarta pada akhir tahun 2011. Gerakan ini mendirikan komunitas *Jakarta Gardening* yang telah berkembang hingga mencakup 33 kota dan beberapa kampus di seluruh Indonesia.

Di banyak wilayah di dunia, strategi pertanian perkotaan berkelanjutan melalui pertanian perkotaan telah diadopsi. Berbagai pelaku di Indonesia, termasuk pemerintah, sektor komersial, dan kelompok masyarakat, telah memelopori gagasan *Urban Farming*. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan yang sangat tinggi ketika terjadi kelangkaan lahan untuk produksi pangan di wilayah perkotaan (Smit et al., 2017). Namun pemanfaatan *Urban Farming* di banyak tempat terancam oleh masalah kontinuitas atau *unsustainability*.

Pertanian perkotaan mengalami diskontinuitas karena lebih mahal atau tidak efisien. Hal ini menghalangi penerima manfaat untuk beradaptasi dengan kebutuhan perencanaan metode baru. *Urban Farming* berbasis subsisten yaitu *Urban Farming* yang dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di lingkup rumah tangga dari sudut pandang ekologi politik. Penyediaan pangan bagi penduduk perkotaan merupakan salah satu tugas pertanian perkotaan (Smith et al., 2001). Perubahan hubungan antara produsen dan konsumen makanan tidak dapat dipisahkan dari perubahan pertukaran global dengan kebijakan regional dan nasional yang ada (Schermer, 2015).

Pada pengembangan program *Urban Farming* tidak mungkin memisahkan fungsi masyarakat (Puriandi & Indrajati, 2013). Masyarakat adalah pendukung utama dari berbagai operasi pertanian (Arip, 2003). Untuk melaksanakan *Urban Farming* diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia atau *manpower* mengacu pada kapasitas seseorang. Sumber daya manusia mengacu pada kapasitas individu untuk menggabungkan kekuatan mental dan fisik. Keturunan dan lingkungan mempengaruhi perilaku dan sifat, tetapi prestasi kerja didorong oleh tujuan untuk mencapai kesenangan (Hasibuab, 2007).

Motif, karakter, konsep diri, pengetahuan, dan kemampuan semuanya berperan dalam menentukan kompetensi seseorang. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang terampil untuk keberhasilan program *Urban Farming*, karena manusia merupakan pendukung

utama *Urban Farming*. Unsur sumber daya manusia pada *Urban Farming* yang meliputi masyarakat dan pemerintah menjadi pendukung utama. Niat, tindakan, dan hasil kerja digunakan untuk membuat model arus kausal kompetensi. Mengolah penggunaan lahan terbatas menjadi lahan produktif dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang (Hidayat, 2014).

Mengadakan *Urban Farming* adalah salah satu inisiatif tersebut. *Urban Farming* adalah upaya memanfaatkan ruang terbatas di perkotaan untuk menghasilkan pangan. Industri pertanian biasanya diasosiasikan dengan wilayah pedesaan dengan lahan kosong dan ruang terbuka, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan pengembangan pertanian di wilayah metropolitan. Inisiatif Pertanian Perkotaan menunjukkan peningkatan industri pertanian di perkotaan. Program Pertanian Perkotaan adalah jenis kegiatan pertanian yang berlangsung di perkotaan, sering dikenal sebagai pertanian perkotaan. Pertanian kota, melalui pemanfaatan pekarangan yang tidak berpenghuni, memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan kecerdikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama program *Urban Farming* adalah untuk meningkatkan produksi dan kemandirian rumah tangga perkotaan yang kurang mampu. Hal ini juga membantu mereka dalam menangani isu-isu seperti kerawanan pangan dan kelangkaan lahan. Namun untuk pengembangan *Urban Farming* tentunya membutuhkan peranan secara langsung dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus bagi penulis untuk menganalisis bagaimana peranan penting masyarakat perkotaan dalam pengembangan Program *Urban Farming*. Selain itu, penulis juga akan melihat bagaimana masyarakat yang menjadi subjek dalam *Urban Farming* akan menjadi pondasi dalam membangun ketahanan pangan nasional di masa Pandemi dan setelahnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana peran masyarakat terhadap Program “*Urban Farming*” dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. Metode ini dapat digunakan sebagai alat untuk meneliti data seperti sistem pemikiran manusia, fenomena yang terjadi, dan kondisi sekitar. Penelitian kualitatif deskriptif

dapat berguna untuk menjelaskan hubungan antar fenomena yang terjadi bahkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dan terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji secara mendalam mengenai kondisi fenomena dan fakta yang nantinya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Sebagai Subjek Utama Program *Urban Farming*

Kata “partisipasi” berasal dari kata bahasa Inggris “*participate*” yang artinya mencakup, ikut serta. Menurut Adi (2007) partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses mengenali masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya mewajibkan masyarakat memilih dan membuat penilaian tentang alternatif pemecahan masalah, melaksanakan upaya mengatasi kesulitan, dan menilai perubahan yang terjadi. Sejak wabah Covid-19 melanda seluruh dunia terutama di perkotaan, upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu yang akhir-akhir ini banyak disikapi oleh semua pihak sebagai akibat dan akibatnya.

Populasi perkotaan Indonesia tumbuh dengan pesat. Pada tahun 2020, ada 56 persen penduduk perkotaan di Indonesia dari total populasi negara yang berjumlah 273,5 juta. Pada tahun 2025, jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 170,4 juta orang atau merupakan 59,3 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 287 juta orang (Worldometers, 2021). Menurut statistik dari rumah tangga miskin, 71 persen rumah tangga perkotaan tergolong sangat rawan pangan, sedangkan 19 persen sisanya tergolong rawan pangan.

Rendahnya tingkat pendapatan per kapita keluarga setiap bulannya menyebabkan tingginya jumlah penduduk perkotaan berpengaruh pada rendahnya ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Inisiatif *Urban Farming* dapat digunakan untuk menghadapi keadaan saat ini dan sebagai solusi untuk kesulitan pangan selama pandemi Covid-19. Hal ini karena manusia merupakan motor penggerak *Urban Farming*, maka unsur sumber daya manusia yang kompeten menjadi pendukung terpenting. Masyarakat dan Pemerintah merupakan dua sumber daya manusia yang berperan penting. Namun demikian, baik masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya memahami konsep *Urban Farming*.

Kompetensi yang dimaksud meliputi intensi karakteristik personel, tindakan perilaku, keterampilan, dan hasil kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung *Urban Farming* dan adanya proses kolaborasi, kebijakan, strategi, dan upaya jangka panjang

akan menciptakan peluang bagi organisasi dan bisnis untuk memiliki visi dan misi yang didukung oleh strategi, tujuan, dan publisitas terarah. Berkebun perkotaan dimaksudkan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan. Hal ini tentunya secara bertahap namun pasti akan mendorong perekonomian ke arah keberlanjutan jangka panjang.

Sumber Daya Manusia pada *Urban Farming* diharuskan mampu mewujudkannya. Pertanian tradisional dan pertanian dengan teknologi terbaru berupa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) dapat dipisahkan menjadi dua kategori di Indonesia. Oleh karena itu, skenario yang harus direncanakan, khususnya sumber daya manusia yang kompeten untuk membantu *Urban Farming* dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, harus dirancang.

Perwujudan Ketahanan Pangan Melalui Program *Urban Farming*

Ketahanan pangan tidak mengharuskan swasembada pangan karena bergantung pada sumber daya yang tersedia. Suatu negara dapat memproduksi dan mengekspor komoditas pertanian dan industri yang bernilai tinggi, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Orang yang rawan pangan ditemukan di negara-negara yang mandiri dalam produksi pangan di tingkat nasional karena hambatan ketersediaan dan distribusi pangan (Stevens et al., 2000). Ketahanan pangan didefinisikan sebagai tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan murah, menurut Undang-Undang Pangan Indonesia No. 7 Tahun 1996.

Suryana (2004) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kegiatan ekonomi yang saling terkait mengenai ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, didukung oleh pemangku kepentingan (produsen, pemasar, pengolah, dan konsumen) dikelola oleh berbagai institusi (sektoral, subsektoral, skala usaha, pemerintah, dan masyarakat) dan melibatkan interaksi timbal balik antar wilayah. Pada kota-kota besar Indonesia, pertanian perkotaan digunakan sebagai solusi keberlanjutan pangan. Tidak dapat dihindari bagi kota besar untuk mengandalkan daerah sekitarnya untuk bahan makanan setiap hari. Puriandi & Indrajati (2013) memperkirakan 97 persen kebutuhan pangan kota Bandung dipenuhi oleh daerah di luar kota, seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Karawang, Subang, Sumedang, Garut, dan Majalengka di Provinsi Jawa Tengah. Ketika ketersediaan dan akses pangan yang terbatas muncul sebagai akibat dari pendapatan penduduk yang tidak merata, konflik kemiskinan pun terjadi.

Menurut temuan Athariyanto dan Tauran (2013), Kampung Made di Surabaya yang dipimpin oleh sekelompok 563 petani Made Bersinar merupakan salah satu komunitas yang telah efektif menerapkan inisiatif *Urban Farming*. Desa Made berhasil mengentaskan kemiskinan dan menukar barang pertanian dengan komoditas. Hasil dari pemasaran komoditas ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan finansial penduduk, memungkinkan mereka untuk memberikan semangat untuk pengembangan lebih lanjut di masyarakat. Selain di Surabaya, telah dilaksanakan *Urban Farming* melalui Bandung Berkebun salah satunya di RW 04 Tamansari Bandung sebagai bagian dari inisiatif desa *Urban Farming*. Instalasi pertanian vertikal digunakan untuk mempromosikan inisiatif ini.

Masyarakat terpaksa membatasi aktivitasnya di luar rumah akibat Pandemi Covid-19. Sekalipun orang hanya bekerja dari rumah, produktivitas dan ketahanan pangan keluarga harus tetap terjaga. Menurut penelitian yang dilakukan, DKI Jakarta, urban farming menyumbang 69 persen dari total pendapatan keluarga pada pengeluaran tunai dan 62,7 persen dari total pendapatan rumah tangga terhadap total pengeluaran terhadap total pendapatan rumah tangga. Ini menunjukkan bagaimana taman kota Jakarta menambah pendapatan masyarakat (Rachmawati, 2020).

Pandangan masyarakat terhadap inisiatif *Urban Farming* cukup baik. Masyarakat sadar akan banyaknya jenis program urban garden dan kelebihanannya. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan rencana kerja seperti tanaman yang akan ditanam, bibit yang akan digunakan, peralatan yang akan diproduksi, serta penempatan pipa dan pot tanaman yang akan ditanam. Diyakini bahwa dengan sumber daya manusia yang kompeten, *Urban Farming* dan ketahanan pangan berkelanjutan dapat dicapai secara perlahan tapi pasti. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam *Urban Farming*, yang tentunya memerlukan proses dalam bentuk kebijakan dan inisiatif strategis serta kerangka waktu, organisasi, perusahaan, dan ekonomi akan dapat mencapai pangan jangka panjang (Sastro, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan karena manusia merupakan motor penggerak *Urban Farming*, maka unsur sumber daya manusia yaitu masyarakat perkotaan menjadi pendukung terpenting. Masyarakat perkotaan dan pemerintah merupakan dua sumber daya manusia yang berperan. Namun demikian, baik masyarakat maupun

pemerintah belum sepenuhnya memahami konsep *Urban Farming*. Pertanian perkotaan tidak boleh lagi diabaikan, mengingat peran dan potensinya yang signifikan. Sudah saatnya juga pengembangan pertanian perkotaan menjadi perhatian, karena pertanian perkotaan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu pendukung dalam pencapaian ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di perkotaan. Implementasi *Urban Farming* di Indonesia dapat mencontoh praktik di negara lain. Meskipun banyak kota di Indonesia yang mulai mengadopsi dan memperluas pertanian perkotaan, masih banyak kota di tanah air yang masih mengandalkan impor pangan dari daerah lain. Diyakini bahwa dengan sumber daya manusia yang kompeten, *Urban Farming* dan ketahanan pangan berkelanjutan dapat dicapai secara perlahan tapi pasti. Dengan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam *Urban Farming*, yang tentunya memerlukan proses berupa kebijakan dan inisiatif strategis serta kerangka waktu, organisasi, perusahaan, dan ekonomi akan mampu mencapai ketahanan pangan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arip, S. (2003). Modernisasi Irigasi, Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) dan Kebutuhan Riset Tentang Irigasi di Masa Depan. *Prosiding Pertemuan Singkat Di Balai Besar Keteknikan Pertanian*.
- Athariyanto, & Tauran. (2013). Implementasi program urban farming di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Journal Publika*, 1(2).
- Hasibuab. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hidayat, M. Y. (2014). Urban Farming: Rekonstruksi Lahan Minimalis Menjadi Lahan Produktif Daerah Perkotaan. *Majalah Beranda MITI*.
- Jalil, A. (2005). Kota: Dari Perspektif Urbanisasi. *Jurnal Industri Dan Perkotaan*, IX(15).
- Noorsya, & Kustiwan. (2013). Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandung yang Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota B SAPPK*, 2(1).
- Puriandi, & Indrajati. (2013). Proses Perencanaan Kegiatan Pertanian Kota yang Dilakukan oleh Komunitas Berkebun di Kota Bandung sebagai Masukan Pengembangan Pertanian

- Kota di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(2).
- Rachmawati, R. (2020). *Urban Farming: Strategi Ketahanan Pangan Keluarga Perkotaan pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Sastro. (2013). Pertanian Perkotaan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan. *Buletin Pertanian Perkotaan*.
- Schermer, M. (2015). From “Food from Nowhere” to “Food from Here”: Changing Producer Consumer Relations in Africa. *Agric Hum Values*, 32.
- Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). The self-regulation of motivation: Motivational strategies as mediator between motivational beliefs and engagement for learning. *International Journal of Educational Research*, 82, 124–134. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.01.006>
- Smith, J., Nasr, & Ratta. (2001). *Urban Agriculture, Food, Jobs, and Sustainable Cities*.
- Stevens, J. D., Bonfil, R., Dulvy, N. K., & Walker, P. A. (2000). The effects of fishing on sharks, rays, and chimaeras (chondrichthyans), and the implications for marine ecosystems. *ICES Journal of Marine Science*, 57.
- Suryana, A. (2004). Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pertanian*.
- Worldometers. (2021). *Countries in the world by population*.